



PATRONASE POLITIK DAN EKONOMI DALAM RANTAI DISRIBUSI KAYU GELAMTRADISIONAL DI DESA SEBOKOR KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

Hanif Muhadi ¹, Ainur Ropik ², Ibrahim Mifthafariz Mirza ³

UIN Raden Fatah Palembang

hanifmuhadi4@gmail.com

Abstract (English)

This study analyzes political and economic patronage within the traditional distribution chain of gelam wood in Sebokor Village, Air Kumbang District, Banyuasin Regency. The high volume of gelam wood distribution, which is disproportionate to the limited local production land, combined with weak legal permits and institutional supervision, indicates the presence of informal mechanisms sustaining this economic activity. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and documentation to examine patterns of resource access, actor relations, and power mechanisms. The findings reveal that the distribution system operates through an asymmetric patron–client network, where patrons control capital, market access, permits, and protection, while factory owners and loggers occupy dependent positions. Fragmented institutional authority and the community's economic dependence further reinforce patronage practices as an adaptive strategy within a legal grey area. Consequently, the sustainability of gelam wood distribution is shaped more by power relations and social networks than by formal legal mechanisms, highlighting the need for strengthened governance, coordinated supervision, and alternative livelihoods to reduce dependence on patronage systems.

Article History

Submitted: 1 Februari 2026

Accepted: 4 Februari 2026

Published: 5 Februari 2026

Key Words

patronage, patron–client relations, gelam wood, forest resource distribution, local economy.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini menganalisis patronase politik dan ekonomi dalam rantai distribusi kayu gelam tradisional di Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Tingginya aktivitas distribusi kayu gelam yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan produksi lokal, disertai lemahnya legalitas perizinan dan pengawasan kelembagaan, mengindikasikan adanya mekanisme informal yang menopang keberlangsungan usaha tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk mengkaji pola akses sumber daya, struktur relasi antaraktor, serta mekanisme kuasa yang terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kayu gelam dijalankan melalui jaringan patron–client yang bersifat asimetris, di mana patron menguasai modal, akses pasar, perizinan, dan perlindungan, sedangkan pemilik pabrik dan penebang berada pada posisi bergantung. Fragmentasi kewenangan antarinstansi dan ketergantungan ekonomi masyarakat semakin memperkuat praktik patronase sebagai strategi adaptif dalam ruang abu-abu hukum. Dengan demikian, keberlanjutan distribusi kayu gelam lebih ditentukan oleh relasi kuasa dan jejaring sosial dibandingkan mekanisme legal formal, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, koordinasi pengawasan, dan alternatif mata pencaharian untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem patronase.

Sejarah Artikel

Submitted: 1 Februari 2026

Accepted: 4 Februari 2026

Published: 5 Februari 2026

Kata Kunci

patronase, patron–client, kayu gelam, distribusi sumber daya hutan, ekonomi lokal.



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor kehutanan yang berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat lokal. Pemanfaatan sumber daya hutan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya seperti tingkat pendidikan, akses kerja, serta kondisi sosial masyarakat, yang membentuk pola pemanfaatan sumber daya alam secara dinamis dan berimplikasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah kayu gelam (*Melaleuca cajuputi*), yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah rawa Sumatera dan Kalimantan. Kayu gelam dikenal memiliki ketahanan terhadap air dan daya tahan tinggi sehingga secara tradisional digunakan untuk konstruksi rumah panggung, jembatan, dermaga, dan perahu. Di Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, aktivitas pemanfaatan dan distribusi kayu gelam telah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun.

Namun demikian, meskipun volume distribusi kayu gelam di Desa Sebokor tergolong tinggi, transparansi mengenai asal-usul kayu dan legalitas perizinan masih sangat terbatas. Aktivitas distribusi kayu gelam tetap berlangsung secara relatif stabil meskipun banyak pelaku usaha beroperasi tanpa izin formal yang lengkap. Kondisi ini mengindikasikan adanya mekanisme informal yang memungkinkan aktivitas ekonomi tersebut terus berjalan, salah satunya melalui jaringan patronase. Letak geografis Desa Sebokor yang berdekatan dengan kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan—sebuah kawasan konservasi yang juga menjadi habitat alami kayu gelam—menambah kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kedekatan ini menciptakan dinamika antara kepentingan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sekaligus membuka ruang abu-abu dalam praktik pemanfaatan kayu gelam.

Dalam situasi ketidakpastian regulasi dan keterbatasan akses masyarakat terhadap perizinan formal, hubungan patronase ekonomi muncul sebagai strategi adaptif. Patronase dalam konteks ini merujuk pada hubungan pertukaran keuntungan ekonomi antara aktor yang memiliki akses modal, pasar, atau kekuasaan dengan pelaku usaha kayu gelam skala kecil. Hubungan ini memungkinkan keberlangsungan bisnis kayu gelam tradisional, namun juga menciptakan ketergantungan dan ketimpangan distribusi keuntungan dalam rantai distribusi. Penelitian mengenai patronase dalam sektor sumber daya alam di Indonesia umumnya berfokus pada industri ekstraktif skala besar, sementara kajian mengenai patronase ekonomi pada bisnis kayu skala kecil di tingkat desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola patronase politik dan ekonomi dalam rantai distribusi kayu gelam tradisional di Desa Sebokor, khususnya dalam konteks legalitas, akses sumber daya, dan hubungan antaraktor ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika patronase politik dan ekonomi dalam rantai distribusi kayu gelam tradisional di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, relasi, serta proses sosial yang berlangsung dalam praktik pemanfaatan sumber daya hutan, khususnya dalam konteks ketidakpastian regulasi dan hubungan antaraktor ekonomi. Data penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan realitas sosial berdasarkan temuan di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah



narasumber yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis kayu gelam tradisional, serta melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, arsip, berita daring, serta sumber lain yang relevan untuk memperkuat analisis dan memastikan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis desa tersebut sebagai salah satu pusat aktivitas distribusi kayu gelam tradisional, sekaligus kedekatannya dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Padang Sugihan yang menimbulkan dinamika tersendiri dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Lokasi ini memberikan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji praktik patronase dalam bisnis kayu skala kecil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa informan kunci untuk menggali informasi mengenai mekanisme distribusi kayu gelam, dinamika regulasi, serta struktur jaringan patronase yang memfasilitasi keberlangsungan aktivitas ekonomi tersebut. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik distribusi kayu gelam dan interaksi antaraktor yang terlibat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan arsip, foto, berita, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian. Data yang diperoleh dicatat, dikodekan, kemudian diklasifikasikan dan disintesis untuk menemukan pola, hubungan, serta kategori yang bermakna. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan substantif yang menjelaskan pola patronase politik dan ekonomi dalam rantai distribusi kayu gelam tradisional di Desa Sebokor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. POLA AKSES TERHADAP SUMBER DAYAKAYU GELAM

Diskrepansi antara volume produksi kayu gelam di Desa Sebokor dan kapasitas lahan yang tersedia menunjukkan adanya kompleksitas dalam sistem distribusi sumber daya hutan di tingkat lokal. Ketidakseimbangan ini tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis produksi, melainkan mencerminkan mekanisme sosial dan ekonomi yang memungkinkan aktivitas distribusi kayu gelam tetap berlangsung dalam kondisi ketidakjelasan regulasi. Fenomena ini menjadi penting untuk dianalisis karena membuka pemahaman mengenai bagaimana legalitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya dikonstruksi dan dinegosiasikan oleh para aktor yang terlibat.

Secara geografis, wilayah Desa Sebokor didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, karet, kawasan milik perusahaan perkebunan, serta area permukiman dan fasilitas umum. Tidak terdapat lahan khusus yang secara sistematis digunakan masyarakat untuk menanam kayu gelam sebagai bahan baku produksi. Kayu gelam yang terdapat di kebun masyarakat umumnya tumbuh secara liar dan jumlahnya sangat terbatas, sehingga tidak mampu menopang kebutuhan bahan baku pabrik kayu yang beroperasi secara rutin. Kondisi ini menegaskan bahwa basis produksi kayu gelam di tingkat desa tidak memadai untuk menjelaskan tingginya volume distribusi yang berlangsung setiap hari. Ketiadaan sumber bahan baku lokal yang memadai menimbulkan pertanyaan krusial mengenai asal-usul kayu gelam yang diolah oleh pabrik-pabrik kayu kecil di Desa Sebokor. Kedekatan wilayah desa dengan kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan—yang secara ekologis merupakan habitat alami kayu gelam—menjadi konteks penting dalam membaca kemungkinan sumber pasokan kayu tersebut. Kesenjangan antara ketersediaan bahan baku dan



volume produksi yang relatif stabil mengindikasikan adanya sistem pasokan alternatif yang tidak terdokumentasi secara transparan dalam mekanisme formal pengelolaan hutan.

Hasil wawancara dengan pelaku industri lokal menunjukkan bahwa produksi kayu gelam bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada hasil penebangan di lapangan. Dalam kondisi pasokan melimpah, satu pabrik kayu rumahan mampu mendistribusikan sekitar 10–15 meter kubik kayu per minggu, sementara pada saat pasokan menurun, volume produksi dapat turun hingga sekitar 7–8 meter kubik per minggu. Kayu hasil olahan tersebut dipasarkan kepada pengepul lokal maupun dikirim ke luar daerah, tergantung pada permintaan pasar. Pola ini menunjukkan bahwa produksi tidak bersumber dari sistem budidaya yang terencana, melainkan dari aktivitas ekstraksi yang bergantung pada kondisi lapangan. Gambaran mengenai proses ekstraksi kayu gelam diperkuat oleh keterangan dari para penebang kayu yang bekerja secara berkelompok. Aktivitas penebangan umumnya dilakukan oleh kelompok beranggotakan enam hingga delapan orang yang masuk ke kawasan hutan selama dua hingga tiga hari dalam satu kali perjalanan. Dalam satu periode penebangan, kelompok ini dapat memperoleh puluhan batang kayu gelam yang layak, dengan frekuensi kegiatan sekitar tiga hingga empat kali dalam sebulan. Pola kerja ini menghasilkan volume ekstraksi yang cukup signifikan untuk menopang kebutuhan bahan baku pabrik kayu di Desa Sebokor, meskipun sumber kayu tersebut berada di luar wilayah administrasi desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi kayu gelam di Desa Sebokor bergantung pada sistem ekstraksi yang terorganisir dari kawasan hutan di luar basis lahan desa. Ketergantungan pada pasokan yang fluktuatif mengindikasikan adanya jaringan distribusi yang fleksibel namun tidak sepenuhnya transparan. Dalam konteks hubungan patron-klien, pemilik pabrik menempati posisi sebagai aktor yang bergantung pada jaringan penebang dan pemasok kayu yang memiliki akses langsung ke sumber daya hutan, sementara para penebang bergantung pada kepastian pembelian dari pabrik atau pengepul. Relasi ini membentuk pola interdependensi yang kompleks, di mana masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda namun saling membutuhkan. Akses terhadap sumber daya tidak ditentukan semata oleh kepemilikan hak legal, melainkan oleh kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan sosial serta ekonomi dalam jaringan distribusi kayu gelam. Dengan demikian, diskrepansi antara kapasitas lahan dan volume produksi bukan hanya mencerminkan persoalan ekologis, tetapi juga menegaskan keberadaan mekanisme patronase ekonomi yang memungkinkan aktivitas distribusi kayu gelam tetap berlangsung dalam ambiguitas regulasi.

Sistem distribusi kayu gelam di Desa Sebokor melibatkan berbagai aktor dengan posisi dan peran yang berbeda, yang membentuk relasi saling bergantung namun tidak setara. Jika dibaca melalui perspektif teori patron-klien, hubungan antaraktor tersebut memperlihatkan struktur asimetris, di mana sebagian aktor memiliki kendali lebih besar atas akses sumber daya, modal, dan perlindungan, sementara aktor lain berada pada posisi yang lebih rentan sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan baku. Relasi ini memungkinkan aktivitas distribusi kayu gelam terus berlangsung meskipun berada dalam kondisi ketidakpastian regulasi. Salah satu elemen penting dalam sistem distribusi ini adalah jalur transportasi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa distribusi kayu gelam hampir sepenuhnya bergantung pada jalur sungai. Jalur ini dipilih karena karakteristik wilayah sumber kayu yang berupa rawa tergenang air dan tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat. Penguasaan terhadap sarana transportasi sungai, seperti perahu kecil dan tongkang, menjadi faktor kunci dalam menentukan alur distribusi kayu. Aktor yang memiliki modal lebih besar, terutama pemilik pabrik dan pengepul, berperan sebagai patron dengan



menyediakan atau memfasilitasi akses transportasi tersebut. Sementara itu, penebang kayu berada pada posisi klien yang harus menyesuaikan diri dengan mekanisme distribusi yang telah tersedia dan tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan jalur maupun tujuan pemasaran kayu secara mandiri.

Ketergantungan penebang terhadap fasilitas transportasi yang dikuasai patron menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin tidak sekadar bersifat transaksional sesaat, melainkan merupakan pertukaran berulang dalam jangka panjang. Patron memperoleh pasokan kayu yang relatif stabil, sedangkan klien memperoleh akses terhadap sarana distribusi yang tidak mampu mereka sediakan sendiri. Pola ini menciptakan hubungan timbal balik yang berkelanjutan, namun tetap menempatkan klien pada posisi yang lebih lemah secara struktural. Relasi patron–klien juga tampak dalam hubungan antara penebang kayu dan aparat pengawas kehutanan. Secara formal, pengawasan terhadap aktivitas penebangan dilakukan dengan pendekatan represif melalui penindakan, pemusnahan kayu ilegal, serta penyitaan alat penebangan dan transportasi. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik pengawasan di tingkat lokal tidak selalu dijalankan secara kaku. Hubungan personal, kedekatan sosial, serta pemahaman bersama mengenai kondisi ekonomi masyarakat menciptakan ruang kompromi dalam penerapan aturan.

Dalam praktiknya, relasi antara penebang dan aparat pengawas memperlihatkan pola perlindungan selektif. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi dalam batas-batas tertentu yang bersifat situasional. Penebang menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan informal yang tidak tertulis, seperti mengatur waktu pengangkutan, membatasi jumlah kayu yang dibawa, dan menghindari tindakan yang terlalu mencolok. Sebaliknya, aparat pengawas memberikan toleransi terbatas selama aktivitas tersebut tidak dianggap merusak hutan secara besar-besaran. Pola ini menunjukkan bahwa regulasi formal dinegosiasikan melalui hubungan sosial, bukan semata-mata ditegakkan melalui mekanisme hukum. Kondisi ini semakin diperkuat oleh keterbatasan kapasitas pengawasan, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya. Keterbatasan sarana pendukung, seperti minimnya penggunaan teknologi pemantauan modern, menciptakan celah yang memungkinkan praktik patronase tetap beroperasi. Dalam konteks ini, kewenangan formal aparat pengawas tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kontrol efektif di lapangan, sehingga relasi informal menjadi instrumen penting dalam mengatur aktivitas distribusi kayu gelam.

Secara keseluruhan, hubungan antara penebang kayu, pemilik pabrik, pengepul, dan aparat pengawas membentuk jejaring patron–klien yang kompleks dan saling terkait. Intensitas interaksi, frekuensi pertemuan, serta negosiasi informal menjadi indikator kuat dari keberlangsungan hubungan tersebut. Sistem ini berfungsi sebagai semacam jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada kayu gelam, namun pada saat yang sama menciptakan ketergantungan struktural yang sulit diputus. Dengan demikian, distribusi kayu gelam di Desa Sebokor tidak dapat dipahami semata sebagai proses ekonomi teknis. Pola yang terbentuk merupakan sistem patronase informal yang dilembagakan melalui praktik sehari-hari, di mana patron menyediakan akses, perlindungan, dan pasar, sementara klien menyumbangkan tenaga, bahan baku, loyalitas, serta menanggung risiko. Relasi inilah yang memungkinkan sistem distribusi kayu gelam tetap bertahan di tengah ambiguitas legalitas dan lemahnya institusi formal pengelolaan hutan.

B. MEKANISME KUASA DALAM DISRIBUSI KAYU GELAM : Eksploitasi hukum dalam jejaring kuasa

Distribusi kayu gelam di Desa Sebokor menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan paradoksal. Aktivitas penebangan dan distribusi kayu berlangsung secara terbuka



serta menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Namun, sebagian besar kayu tersebut diketahui berasal dari kawasan hutan lindung dan konservasi yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu legalitas, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat berbenturan dengan regulasi kehutanan yang berlaku. Ketegangan antara aturan formal, realitas ekonomi, dan praktik sosial sehari-hari membentuk pola interaksi yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kerangka hukum semata.

Dari perspektif aparat kehutanan, praktik penebangan kayu gelam di wilayah tersebut diakui sebagai aktivitas ilegal. Meskipun demikian, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan operasional, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap komoditas kayu gelam. Situasi ini menempatkan aparat pada posisi dilematis, karena tindakan represif yang ketat berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan warga yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Dengan demikian, implementasi hukum sering kali tidak berjalan optimal dan membuka celah bagi berkembangnya praktik-praktik informal.

Celah kelembagaan tersebut pada masa lalu mendorong terbentuknya hubungan transaksional antara pelaku usaha kayu dan oknum tertentu yang memiliki otoritas pengawasan. Praktik distribusi kayu tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi dan perdagangan, tetapi juga melibatkan pertukaran jasa perlindungan dengan imbalan tertentu. Beberapa pelaku usaha mengandalkan pemberian kompensasi atau pembayaran informal untuk memperoleh informasi dini mengenai patroli atau razia, sehingga mereka dapat menghindari penindakan hukum. Pola ini menunjukkan adanya relasi patronase, di mana pihak yang memiliki kekuasaan menyediakan perlindungan, sementara pelaku usaha memberikan loyalitas maupun keuntungan material sebagai balasan. Hubungan tersebut bersifat personal, selektif, dan bergantung pada kedekatan sosial. Namun, dinamika ini tidak bersifat statis. Perubahan personel dan kepemimpinan di tingkat pengawasan kehutanan membawa dampak signifikan terhadap pola distribusi kayu gelam. Aparat yang baru cenderung menerapkan pengawasan lebih ketat, meningkatkan frekuensi patroli, serta menutup ruang kompromi yang sebelumnya dimanfaatkan pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan pasokan kayu menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko operasional bagi pemilik pabrik. Perubahan tersebut menandai pergeseran dari pola hubungan patron-client yang permisif menuju mekanisme pengawasan yang lebih formal dan tegas.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme kuasa dalam distribusi kayu gelam di Desa Sebokor berjalan melalui relasi patron-client yang lentur dan kontekstual. Pada satu sisi, keterbatasan struktural aparat menciptakan ruang toleransi terhadap praktik ilegal. Pada sisi lain, pelaku usaha memanfaatkan hubungan personal dan pertukaran imbalan untuk mempertahankan kelangsungan aktivitasnya. Namun, ketika struktur pengawasan mengalami perubahan, relasi patronase tersebut dapat melemah atau bahkan terputus. Dengan demikian, keberlanjutan distribusi kayu gelam tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, melainkan juga oleh konfigurasi kekuasaan, aktor, dan jaringan sosial yang berkembang di lapangan. Pola hubungan yang asimetris justru menjadi mekanisme adaptif yang memungkinkan aktivitas ini bertahan di tengah tekanan regulasi.

Mekanisme distribusi kayu gelam di Desa Sebokor menunjukkan kerumitan yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penebangan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang melingkupinya. Aktivitas ekonomi ini beroperasi dalam situasi legalitas yang tidak jelas, sehingga membuka ruang bagi terbentuknya relasi kuasa informal. Dalam perspektif patron-client, pola tersebut mencerminkan hubungan asimetris, di mana aktor yang memiliki otoritas, modal,



dan jaringan mengendalikan akses terhadap izin, perlindungan, serta distribusi, sementara pelaku di tingkat bawah menyesuaikan diri dengan struktur yang telah terbentuk. Dari sisi aparat kehutanan, permasalahan utama terletak pada ketiadaan legalitas formal. Sebagian besar pabrik kayu gelam diketahui tidak memiliki izin usaha yang lengkap sesuai ketentuan, dan kayu yang didistribusikan keluar desa juga tidak disertai dokumen resmi berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Kondisi ini menempatkan aktivitas distribusi dalam ruang abu-abu hukum, sehingga sulit dilakukan pengawasan secara administratif. Aparat kehutanan mengakui telah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memperjelas legalitas tersebut, namun prosesnya masih memerlukan waktu. Ketidadaan dokumen formal ini pada akhirnya menciptakan situasi di mana fungsi legalitas sering kali digantikan oleh perlindungan informal melalui jejaring kekuasaan tertentu.

Sementara itu, aparat desa menunjukkan sikap berhati-hati dan cenderung enggan memberikan penjelasan rinci terkait persoalan perizinan. Sensitivitas ini mengindikasikan bahwa isu legalitas kayu gelam berada dalam ranah yang melibatkan kepentingan aktor-aktor yang lebih dominan, sehingga membatasi ruang gerak aparat di tingkat lokal. Dalam kerangka patron-client, posisi tersebut merefleksikan kedudukan klien yang tidak sepenuhnya memiliki otonomi untuk berbicara terbuka karena berada di bawah pengaruh struktur kuasa yang lebih tinggi. Fragmentasi kewenangan juga terlihat pada institusi kepolisian sektor setempat. Polsek Air Kumbang menempatkan diri bukan sebagai aktor utama dalam pengawasan kehutanan, melainkan hanya bertindak berdasarkan koordinasi formal dengan instansi teknis terkait. Tanpa adanya laporan resmi atau permintaan tindakan, distribusi kayu dianggap berjalan sebagaimana mestinya. Prioritas mereka lebih difokuskan pada penanganan kriminalitas umum. Pola kerja yang reaktif ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengawasan terpadu terhadap rantai distribusi kayu gelam. Dalam konteks patron-client, fragmentasi kelembagaan tersebut menciptakan celah struktural yang memungkinkan praktik distribusi berlangsung tanpa kontrol yang ketat, sekaligus memberi ruang bagi berkembangnya jejaring patronase.

Di tingkat pelaku usaha, struktur kuasa yang lebih jelas terlihat melalui keberadaan aktor dominan yang berperan sebagai pengendali utama distribusi. Pemilik pabrik kayu gelam tidak sepenuhnya mengatur proses pembelian dan pemasaran, melainkan bergantung pada sosok “bos besar” yang memiliki akses terhadap perizinan, jaringan pembeli, serta koneksi eksternal. Aktor ini, yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum, berfungsi sebagai patron yang menyediakan perlindungan sekaligus akses pasar. Pemilik pabrik berada pada posisi perantara yang mengelola operasional produksi, sedangkan kendali strategis tetap berada pada patron puncak. Struktur patronase tersebut semakin terlihat pada tingkat penebang. Para penebang bekerja dengan sistem permodalan awal, di mana biaya operasional seperti logistik dan transportasi disediakan terlebih dahulu, kemudian dipotong dari hasil kayu yang diperoleh. Skema ini menunjukkan ketergantungan finansial terhadap pihak yang memiliki modal lebih besar. Selain itu, penebang umumnya tidak mengetahui secara jelas aktor-aktor yang mengatur distribusi di luar desa, karena hubungan mereka terbatas pada pemilik pabrik. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak informasi sekaligus ketimpangan akses, di mana kendali distribusi sepenuhnya berada di tangan patron tingkat atas.

Temuan-temuan tersebut menegaskan adanya hierarki kekuasaan yang bertingkat dalam sistem distribusi kayu gelam. Patron puncak menguasai modal, legalitas, dan jaringan pasar; pemilik pabrik berperan sebagai pengelola operasional; sedangkan penebang menjadi penyedia tenaga kerja yang paling rentan. Pola ini menunjukkan indikator struktural dalam teori patron-



client, yakni ketergantungan vertikal yang menciptakan relasi timbal balik namun tidak setara. Di sisi lain, distribusi kayu gelam juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Sebagian warga masih menggantungkan penghidupan pada sektor ini, baik sebagai penebang, pekerja pabrik, maupun pengangkut kayu. Meskipun pemerintah telah mendorong diversifikasi mata pencaharian, kayu gelam tetap menjadi pilihan utama karena memberikan penghasilan cepat dan relatif mudah diakses. Ketergantungan ekonomi tersebut menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara keseluruhan, mekanisme distribusi kayu gelam di Desa Sebokor tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan sebagai hasil interaksi antara lemahnya legalitas formal, fragmentasi kelembagaan, dominasi aktor berkuasa, serta ketergantungan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif patron–client, relasi asimetris inilah yang memungkinkan distribusi tetap bertahan di tengah keterbatasan regulasi. Jaringan patronase berfungsi sebagai pengganti mekanisme formal, sekaligus menjadi sarana adaptasi bagi para pelaku untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi mereka di ruang abu-abu legalitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kayu gelam tradisional di Desa Sebokor berlangsung melalui jaringan patronase politik dan ekonomi yang membentuk relasi patron–client yang asimetris. Ketiadaan legalitas formal, lemahnya pengawasan kelembagaan, serta fragmentasi kewenangan antarlembaga menciptakan ruang abu-abu hukum yang memungkinkan praktik distribusi tetap berjalan secara informal. Dalam struktur ini, patron menguasai akses modal, perizinan, perlindungan, dan jaringan pasar, sementara pemilik pabrik dan penebang berada pada posisi bergantung. Di sisi lain, tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kayu gelam menjadikan sistem patronase sebagai strategi bertahan hidup, meskipun berisiko secara hukum. Dengan demikian, keberlanjutan distribusi kayu gelam tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi oleh relasi kuasa dan jejaring sosial yang mengatur akses terhadap sumber daya. Penataan sektor ini memerlukan penguatan tata kelola, koordinasi pengawasan, serta penyediaan alternatif ekonomi agar ketergantungan terhadap patronase dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrirurrahman, F., & Ratnaningsih, Y. (2020). Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Desa Daha Kecamatan Hu’U Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 3(2), 86-89.
- Hidayati, H., Dharmawan, A., & Pandjaitan, N. (2017). Analisis kekuasaan ekonomi politik dalam mengakses lahan hutan. *Jurnal Sodality [Internet]. [Diunduh 10 April 2018]. Bogor (ID): Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dapat diunduh pada: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/17969/12>.*
- As' ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan jaringan patronase: dinamika kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-17.
- Pratama, R. A., & Tandi, R. (2023). POLITIK PATRONASE PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(2), 129-139.



- Arby, M., Sriati, S., Yamin, M., & Tertiarto, T. (2024, Desember). Kajian Valuasi Ekonomi Lahan Rawa Gambut di Sekitar Kawasan Industri Gasing di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam *Seminar Nasional Lahan Suboptimal* (Vol. 12, No. 1, pp. 969-975).
- Hidayati, H., Dharmawan, A., & Pandjaitan, N. (2017). Analisis kekuasaan ekonomi politik dalam mengakses lahan hutan. *Jurnal Sodality [Internet]. [Diunduh 10 April 2018]. Bogor (ID): Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dapat diunduh pada: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/17969/12>.*
- Rachmawan, D., Seda, F. S. S. E., & Siburian, R. (2021). Melengkapi Analisa Teori Akses dengan Pendekatan Kolaboratif pada Konteks Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti, Pemalang. *Jurnal Kawistara*, 11(2), 156.
- Peluso, Nancy Lee, and Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand." *The Journal of Asian Studies* 60(3): 761-812.
- Kartodihardjo, H. (2017). Di balik krisis ekosistem: Pemikiran tentang lingkungan hidup dan kehutanan. LP3ES.
- Syafiie, Inu Kencana. (2020). Pengantar Ilmu Politik . Bandung: Pustaka Reka Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American political science review*, 66(1), 91-113.
- Komarudin, U., & Pramuji, P. (2023). Between Clientelism and Patrimonialism: Local Politics of the Philippines and Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* Volume, 8(1).
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford university press.
- Law, J. (2008). Actor network theory and material semiotics. *The new Blackwell companion to social theory*, 141-158.
- Yanuaris, V. (2022). *Politik Patronase Sebagai Tantangan Demokrasi di Indonesia dan Cendekiawan Sebagai Gerakan Alternatif* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).
- Andhika, L. R. (2019). Bahaya patronase dan klientelisme dalam pemilihan kepala desa serentak. *Kajian*, 22(3), 205-220.
- Cahyati, D. D., & Lopo, Y. H. L. (2019). Daily Patronage Politics: A Village Chief's Route to Power. *PCD Journal*, 7(2), 169-196.
- Ramli, M. (2016). Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal (Analisis terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati pada Pemilukades di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba). *Skripsi, Fakultas U (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar)*, 1-88.
- Kartodihardjo, H. (2017). Di balik krisis ekosistem: Pemikiran tentang lingkungan hidup dan kehutanan. LP3ES.
- Parker, D. (2002). Economic regulation: a review of issues. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 73(4), 493-519.
- Williamson, O. E. (2007). *The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting* (pp. 61-75). Gabler.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American journal of sociology*, 91(3), 481-510.
- Uzzi, B. (2018). Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. In *The sociology of economic life* (pp. 213-241). Routledge.